



Kajian Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya

Sujarwo^{1✉}, Rr. Vita Nur Latif², Ardriana Priharwanti³

¹⁾Sanitarian UPT PuskesmasKusumaBangsa, DINKES Kota Pekalongan

^(2,3)Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, UNIKAL

Korespondensi : puskesmaskusumabangsa@gmail.com

ARTICLE INFO :

Accepted :

Approve :

Publish :

ABSTRACT

Food Safety is a condition and effort needed to prevent Food from the possibility of biological, chemical and other contamination that can disturb, harm and even danger human health. According to Supervision of food safety in Pekalongan City in 2010-2012 showed that 6.27% of food contained hazardous food additives. Local government policies related to food safety already exist, but their implementation has not been studied. The Purpose of research that to show the implementation of Pekalongan City Regulation No. 07/2013. The design of this study was qualitative research. The results of this study identified that the Regional Regulation of Pekalongan City No. 7/2013 has been implemented well, but has not been optimal in enforcing sanctions against violators of regional regulations and lack of socialization to the community.

Key Word: food safety, local regulations

ABSTRAK

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan bahkan dapat membahayakan kesehatan manusia. Pengawasan keamanan pangan di Kota Pekalongan tahun 2010-2012 menunjukkan hasil sebanyak 6,27% pangan mengandung BTP berbahaya. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait keamanan pangan sudah ada, tetapi implementasinya belum dilakukan kajian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.7 Tahun 2013 sudah diimplementasikan dengan baik, tetapi belum optimal dalam penegakan sanksi terhadap oknum yang melakukan pelanggaran PERDA dan kurang sosialisasi ke masyarakat.

Kata Kunci : keamanan pangan, peraturan daerah

PENDAHULUAN

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mendefinisikan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

(Surono *et al*, 2018, menjelaskan bahwa keamanan pangan adalah suatu proses penjaminan pangan dalam proses produksi pengolahan pangan dengan tujuan untuk menyediakan makanan yang aman untuk dikonsumsi. Secara garis besar pangan yang aman adalah pangan yang bebas dari bahaya biologis, bahaya kimiawi dan bahaya fisik/ benda asing. Surono *et al*, 2018, menjelaskan lebih lanjut bahwa, ancaman bahaya kimiawi biasanya jarang diwaspadai karena dampaknya yang jarang langsung terjadi karena bersifat akumulatif, akan tetapi ada beberapa yang memberikan dampak langsung seperti iritasi pada tenggorokan ataupun gejala penyakit umum lainnya.

Ancaman bahaya kimiawi bisa saja berasal dari penggunaan bahan tambahan pangan berizin yang melebihi takaran, bahan kimia berbahaya yang dengan sengaja ditambahkan kedalam pangan seperti zat pengawet (*borax* dan *formalin*), zat pewarna (*Rhodamin B* dan *Methanlyll Yellow*) ataupun bahan peramu lainnya.

Rahayu, *et al*, 2018, menjelaskan lebih dalam bahwa Bahan Tambahan Pangan (BTP) berbahaya ini dapat berpengaruh pada gangguan kesehatan baik secara langsung seperti tenggorokan terasa terbakar, iritasi, sakit kepala serta mual, sedangkan pengaruh tidak langsung (menahun/ akumulatif) seperti gangguan sistem pernafasan, gangguan pada ginjal dan hati, gangguan sistem reproduksi dan kanker, serta kematian.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 07 Tahun 2013 tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya tersebut salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pangan yang menjamin kelangsungan usaha produksi pangan serta menjamin kesehatan, keamanan, dan keselamatan (masyarakat) konsumen. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2011-2013, melaporkan hasil kegiatan pengawasan keamanan pangan tahun 2010-2012 menunjukkan dari 2.073 sampel pangan yang diperiksa,

6,27% mengandung BTP berbahaya/dilarang.

Berdasarkan studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan didapatkan informasi bahwa pedagang/ penjual pangan belum mengetahui tentang adanya Perda Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013. Masyarakat selaku konsumen belum merasakan manfaat dari Perda tersebut, karena mungkin Perda tersebut oleh Pemerintah Kota Pekalongan sudah diimplementasikan, tetapi belum optimal dalam menjamin kesehatan, keamanan dan keselamatan masyarakat/ konsumen.

Atas dasar inilah peneliti tertarik untuk melakukan studi kajian tentang bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya

METODE PENELITIAN

Disain penelitian ini adalah studi kualitatif. Sumber data primer penelitian ini hasil wawancara dengan informan penelitian melalui pedoman wawancara (*guide interview*) dan catatan lapangan (*field note*). Karakteristik informan dalam penelitian yang akan menjadi sumber informasi diperolehnya data dibagi menjadi : (1). Informan utama adalah

pemegang program/ kegiatan pengawasan keamanan pangan Pemerintah Kota Pekalongan pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan; Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan; dan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan; (2). Informan pendamping adalah produsen pangan skala industri rumah tangga pangan (IRTP) yang berusia 15-65 tahun dan proses produksinya ada di Kota Pekalongan. Informan pendamping yang akan menjadi responden adalah produsen pangan skala rumah tangga yang mewakili jenis pangan yang dijual di masyarakat dan merupakan jenis pangan dalam kegiatan pengawasan keamanan pangan, merupakan pangan yang paling sering dicurigai mengandung bahan tambahan pangan berbahaya; dan (3) Informan triangulasi terbagi menjadi 3 kelompok sebagai pembanding yakni kelompok petugas sanitarian Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, kelompok pedagang kecil yang berjualan pangan di Kota Pekalongan yang berusia 15-65 tahun, dan kelompok masyarakat umum yang berusia 15-65 tahun dan tinggal di Kota Pekalongan.

Proses wawancara dilaksanakan dengan mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan keamanan pencegahan Covid-19 selama masa pandemi ini berlangsung.

HASIL

Penelitian ini diperoleh data hasil *in-depth interview* dengan informan penelitian yang kemudian dilakukan pencocokan pola (*pattern matching*) jawaban informan penelitian.

1). Implementasi Perda Kota Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013

Informan utama penelitian ini adalah pemegang program keamanan pangan pada Pemerintah Kota Pekalongan sejumlah 4 informan yakni : 2 informan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 1 informan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan dan 1 informan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan. Informan Pendamping penelitian ini adalah produsen pangan yang proses produksinya di Kota Pekalongan, yang mewakili 5 jenis pangan paling sering ditemukan mengandung BTP berbahaya dari hasil pemeriksaan sampel pangan yang sudah dilakukan oleh informan utama.

Pengetahuan terkait Perda Kota Pekalongan Nomor 07 tahun 2013 tentang larangan Penggunaan Bahan tambahan Pangan Berbahaya, menurut 3 dari 4 informan utama, menyatakan sudah mengetahui tentang Perda tersebut secara garis besarnya saja, walaupun tidak secara

mendetail. Sedangkan menurut 8 dari 9 informan pendamping, sudah tersosialisasi tentang Perda tersebut baik secara langsung dari SKPD terkait, ataupun tidak langsung yang diperoleh dari siswa magang, sesama produsen pangan. Satu informan menyatakan belum tersosialisasi.

Semua informan utama bisa mendeskripsikan pekerjaannya terkait kegiatan keamanan pangan dan semua informan utama menyatakan sudah mengimplementasikan Perda tersebut dalam beberapa bentuk kegiatan seperti sosialisasi dan pengawasan keamanan pangan secara rutin setiap tahunnya, hambatan ataupun kendala tidak ada. Menurut 3 dari 4 informan utama implementasi Perda tersebut sudah ada dukungan dari Pemerintah Kota Pekalongan, tetapi penegakan sanksi tegas terhadap pelanggar Perda belum ada. Menurut 5 dari 9 informan pendamping, berusaha menerapkan informasi yang diperoleh dan sisanya tidak memberikan jawaban.

Sistem Kewaspadaan Keamanan Pangan di Kota Pekalongan, menurut semua informan utama, sudah berjalan dengan baik. Menurut informan utama kegiatan yang pas dalam implementasi Perda Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Larangan Penggunaan

Bahan Tambahan Pangan Berbahaya beberapa diantaranya adalah : sosialisasi ke produsen dan masyarakat, pemeriksaan sampel pangan secara berkala dengan pendampingan dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan serta ada pemberian sanksi tegas bagi pelanggarnya.

Semua informan pendamping menyatakan bahwa sistem keamanan pangan di Kota Pekalongan sudah baik, tetapi menurut mereka perlu ada beberapa kegiatan seperti sosialisasi, pengawasan berkala dari SKPD terkait dan kegiatan kunjungan ke tempat produksi.

2). Pengetahuan dan Sikap Produsen

Pengetahuan produsen, menurut 3 dari 4 informan utama, menyatakan produsen pangan/ pedagang pangan sudah mengetahui tentang bahaya penggunaan BTP berbahaya yang tertuang dalam Perda, tetapi salah satu informan utama menyatakan bahwa produsen pangan/ pedagang pangan belum mengetahui tentang bahaya penggunaan BTP berbahaya pada pangan. Menurut 7 dari 9 informan pendamping, mengetahui tentang pangan yang aman. Penggalan lebih mendalam terhadap informan pendamping diperoleh jawaban bahwa dari 9 informan hanya 1 yang benar-benar tahu tentang BTP berbahaya. Informasi

lebih lanjut, bahwa informan pendamping tidak dapat menyebutkan ciri-ciri pangan yang mengandung BTP berbahaya seperti apa dan bagaimana. Terhadap pangan yang informan pendamping produksi, semua menyatakan pangan yang mereka jual aman dan bahan-bahan produksi yang pakai aman, menggunakan BTP yang diijinkan (rekomendasi dari BPOM).

Sikap produsen, menurut 3 dari 4 informan utama, menyatakan produsen pangan/ pedagang pangan sebagian sudah mampu mengimplementasikannya, hal ini diyakinkan dengan menurunnya jumlah pangan yang mengandung BTP berbahaya di pasaran, walaupun masih ada tetapi jumlahnya sedikit/ relatif masih aman. Penggalan informasi lebih mendalam kepada informan pendamping, 5 dari 9 informan menyatakan sudah memiliki ijin produksi pangan. Pengawasan eksternal terhadap proses produksi pangan, 4 dari 9 informan menyatakan ada pengawasan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas dan sekolah-sekolah, sedangkan 5 sisanya menyatakan tidak ada pengawasan dari pihak luar.

4). Triangulasi Penelitian

Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013

tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan berbahaya, menurut informan triangulasi, pada kelompok pelaksana lapangan menyatakan hanya sedikit mengetahui tentang Perda tersebut, tetapi sudah mengimplementasikannya dalam kegiatan pekerjaan secara rutin setiap tahunnya seperti sosialisasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan. Sedangkan pada kelompok pedagang kecil dan kelompok masyarakat umum, 2 dari 8 informan menyatakan sudah pernah mendapatkan sosialisasi tentang keamanan pangan. Menurut informan triangulasi kelompok masyarakat umum 3 diantara informan menyatakan tidak tahu tentang Perda ini tetapi menurut informan triangulasi, keberadaan Perda ini penting karena untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan agar mereka bisa aman membeli pangan untuk konsumsi.

Pendalaman lebih lanjut diperoleh informasi bahwa menurut informan triangulasi kegiatan yang pas dalam mengimplementasikannya baik menurut informan triangulasi kelompok pedagang kecil maupun kelompok masyarakat umum adalah adanya sosialisasi ke pedagang dan masyarakat, monitoring dan evaluasi terhadap agen/ distributor, sidak pangan.

Penggalian lebih lanjut terhadap informan triangulasi kelompok pelaksana lapangan menyatakan tidak ada hambatan, pedagang maupun produsen kooperatif, tetapi ada sedikit kendala teknis yakni metode pengujian dengan manual dan menggunakan alat kadang berbeda hasilnya, ketidak sesuaian jadwal kegiatan yang harus menyesuaikan dengan jadwal di sekolah. Menurut informan triangulasi kelompok pelaksana lapangan, dukungan Pemerintah Kota Pekalongan sudah ada, tetapi Pemerintah Kota Pekalongan dirasa kurang dalam pemberian sanksi bagi pelanggar dan kurang koordinasi dengan Pemerintah luar Kota Pekalongan.

Pengetahuan Pengetahuan dan Sikap Produsen, menurut informan triangulasi, baik dari kelompok pelaksana lapangan, pedagang kecil dan masyarakat umum, 10 dari 12 informan menyatakan bahwa pedagang mengetahui pangan yang aman itu seperti apa, tetapi 2 informan menyatakan bahwa pedagang sudah tahu pangan yang aman/ tidak seperti apa, tetapi sikapnya sengaja tetap menjual tidak aman agar memperoleh keuntungan lebih.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat dilakukan pembahasan

1).Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013

Hasil penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data primer dengan wawancara terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya. Berdasarkan pola jawaban para informan penelitian dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan berbahaya, sudah diimplementasikan dengan baik dalam bentuk kegiatan sosialisasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan yang beredar secara berkala, namun belum optimal karena belum ada penegakan sanksi bagi pelanggar Perda dan kurangnya koordinasi dengan Pemerintah Daerah tetangga/ daerah luar Kota Pekalongan. Seharusnya Pemerintah Daerah bisa melindungi warganya dari peredaran pangan yang tidak aman, salah satunya adalah pangan aman dari cemaran bahan kimia berbahaya yang dapat berupa cemaran BTP berbahaya atau cemaran bahan kimia lainnya. Pangan yang tidak aman/ tercemar BTP berbahaya dapat merugikan masyarakat yakni berupa munculnya gangguan kesehatan pada

tubuhnya, karena itu perlindungan terhadap masyarakat terhadap pangan yang mengandung BTP berbahaya sangatlah penting.

Kholid, 2015, Teori perubahan perilaku yang dikemukakan oleh *Lawrence W Green*, dalam model PRECEDE-PROCEED menyediakan struktur yang komprehensif untuk menilai kualitas kesehatan masyarakat dengan melihat aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kesehatan. *Proceed*, memadu pelaksanaan dan evaluasi program yang dirancang dalam *Precede*. *Proceed* terdiri atas empat fase, yakni : (1). Intervensi diidentifikasi, (2). Evaluasi proses intervensi, (3). Evaluasi dampak intervensi dan (4). Evaluasi hasil/ kualitas hidup itu sendiri. Didalam prakteknya, model teori *Precede-Proceed* sendiri merupakan sebuah siklus yang tak terputus, dimana arah suatu program/ kegiatan hasil kebijakan pemerintah dituangkan atas dasar masalah publik yang ada di masyarakat.

Hasil penelitian ini hampir sejalan, namun sedikit berbeda dengan yang sudah diteliti oleh Anggiarini, *et al*, 2018, menyatakan bahwa Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terkait keamanan pangan tertuang dalam RENSTRA yaitu Pembinaan dan pengawasan pangan

di lingkungan sekolah. Perlindungan hukum yang diberikan hanya sebatas pengawasan dan pembinaan di lingkungan sekolah. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian Anggiarini, et al, 2018 adalah pada penelitian tersebut belum ada kebijakan/ peraturan daerah yang mengatur tentang keamanan pangan, kebijakan hanya tertuang dalam bentuk RENSTRA (Rencana Strategis) Daerah Kabupaten Jepara, sedangkan pada penelitian ini kebijakan/ peraturan daerah yang mengatur tentang keamanan pangan sudah ada yakni adanya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya. Persamaan pada kedua penelitian ini adalah Kabupaten Jepara maupun Kota Pekalongan sudah ada upaya kegiatan perlindungan terhadap masyarakat baik melalui sosialisasi, pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, tetapi belum ada ketegasan dalam penegakan sanksi bagi pelanggarnya.

Pemerintah Kota Pekalongan sudah mengupayakan perlindungan bagi warganya dari peredaran pangan tidak aman dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Larangan

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan berbahaya. Implementasi Perda tersebut sudah diimplementasikan dengan baik, namun belum optimal dalam sosialisasi keamanan pangan, penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggar Perda dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain. Sosialisasi keamanan pangan ini menurut informan pendamping maupun informan triangulasi dirasa kurang, kemungkinan karena jumlah masyarakat yang sangat banyak dan tidak semua masyarakat menjadi sasaran sosialisasi, tetapi pada kelompok-kelompok tertentu yang menjadi sasaran sosialisasi, serta kemungkinan alokasi anggaran kegiatan sosialisasi hanya beberapa kali dalam setahun, sehingga tidak bisa mencakup seluruhnya dan produsen pangan/ pedagang pangan yang ada jumlahnya banyak dan fluktuatif dalam arti kadang ada yang sudah tutup, baru produksi/ jualan, produksi/ jualan di musim tertentu serta lokasi produksi/ jualan yang tidak permanent sehingga sulit terdata dengan baik. Implementasi Perda dalam penegakan sanksi masih belum optimal, dimungkinkan karena koordinasi secara internal antar SKPD kurang, sehingga kejelasan Perda ini dirasa menjadi kurang. Terkait koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain memang dibutuhkan, karena

masyarakat Kota Pekalongan tidak hanya membeli produk pangan dari daerah Kota Pekalongan saja, tetapi ada kemungkinan membeli produk pangan yang berasal dari daerah di sekitar Kota Pekalongan atau bahkan berasal dari luar Kota Pekalongan.

3). Pengetahuan Dan Sikap Produsen dalam Memproduksi Pangan yang Aman di Kota Pekalongan

Menurut informan utama, 3 dari 4 informan utama menyatakan bahwa produsen pangan/ pedagang pangan sudah mengetahui tentang bahaya penggunaan BTP berbahaya yang termuat dalam Peraturan daerah Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan berbahaya, tetapi salah satu informan utama menyatakan bahwa produsen pangan/ pedagang pangan belum mengetahui tentang bahaya penggunaan BTP berbahaya pada pangan.

Menurut 7 dari 9 informan pendamping menyatakan mengetahui tentang pangan yang aman. Penggalian lebih mendalam terhadap informan pendamping diperoleh jawaban bahwa hanya 1 informan pendamping yang benar-benar tahu tentang BTP berbahaya. Lebih mendalam lagi informan pendamping belum bisa menyebutkan

secara spesifik bahaya dari pangan yang mengandung BTP berbahaya. Terhadap pangan yang informan pendamping produksi, semua menyatakan bahwa pangan yang mereka jual aman dan bahan-bahan produksi dipakai aman, menggunakan bahan tambahan pangan yang diijinkan (rekomendasi dari BPOM) dan tanpa menggunakan bahan kimia berbahaya.

Penggalian informasi lebih mendalam kepada informan pendamping, 5 dari 9 informan menyatakan sudah memiliki ijin produksi. Lima (5) Informan pendamping dalam menyikapi keamanan pangan, menyatakan bahwa ada pengawasan internal dalam proses produksi pangan, bahkan ada 1 informan yang ini inisiatif memeriksakan sampel pangannya ke Labkesda Kota Pekalongan secara mandiri. 3 lainnya menyatakan tidak ada pengawasan internal, hanya berjalan seperti biasa saja. Pengawasan eksternal terhadap proses produksi pangan, 4 dari 9 informan pendamping menyatakan adanya pengawasan eksternal Dinas Kesehatan, Puskesmas dan sekolah-sekolah, sedangkan sisanya menyatakan tidak ada pengawasan dari pihak luar.

Menurut informan triangulasi, baik dari kelompok pelaksana lapangan, pedagang kecil dan masyarakat umum, 10

dari 12 informan menyatakan bahwa pedagang mengetahui tentang pangan yang aman itu seperti apa, dan 2 informan menegaskan bahwa pedagang sudah tahu pangan yang aman/ tidak seperti apa, tetapi sikapnya sengaja tetap menjual pangan tidak aman agar memperoleh keuntungan lebih.

Penggalan informasi lebih lanjut pada informan triangulasi kelompok pedagang kecil. Semua informan menyatakan bahwa mereka mengetahui tentang pangan yang aman dan mampu menyebutkan ciri-ciri pangan yang tidak aman. Lebih lanjut diketahui bahwa pengetahuan informan triangulasi kelompok pedagang kecil sudah ada, tetapi dalam sikapnya belum mampu, hal ini dibuktikan 3 dari 4 informan triangulasi kelompok pedagang kecil bahwa mereka belum memiliki ijin.

Secara ideal produsen pangan akan mengetahui proses produksi pangan yang aman apabila sudah memperoleh informasi tentang pangan dan keamanan pangan baik melalui sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah ataupun memperoleh informasi dari sumber-sumber lain. Setelah produsen pangan mengetahuinya, kemudian ketahanan selanjutnya adalah mau dan mampu, artinya adalah mau memproduksi pangan

aman, dan mampu menerapkannya dalam proses produksi pangan. Hal ini sesuai dengan teori Notoatmojo, 2003, dalam penelitian Handayani dan Hartono, 2016, yang mengemukakan bahwa pendidikan memberikan wawasan yang luas pada seseorang,

semakin tinggi tingkat pengetahuannya seseorang, maka semakin tinggi pula pengetahuannya yang berimplikasi pada kualitas hidupnya. Lebih lanjut Sukandar, 2009, dalam penelitian Handayani dan Hartono, 2016, yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang karena berhubungan dengan daya analitis dan mengamati terhadap objek tertentu. Lebih lanjut, Notoatmojo, 2010, dalam penelitian Handayani dan Hartono, 2016, yang mengatakan bahwa Pendidikan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan seseorang, produsen pangan/ penjual pangan harusnya memiliki pengetahuan tentang pangan yang aman, bergizi dan bermutu, guna menjamin produk pangan yang dihasilkan dan dijual merupakan pangan yang aman untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan penelitian dari Handayani dan Hartono, 2016, yang menyatakan bahwa

adanya hubungan antara pengetahuan dengan sikap penggunaan BTP berbahaya, serta pengetahuan yang mayoritas baik didapatkan pangan yang disajikan di kantin sekolah tidak menggunakan BTP berbahaya.

Hasil penelitian ini diperoleh bahwa pengetahuan produsen pangan/ pedagang pangan sebagian sudah mengetahui tentang pangan dan keamanan pangan, bahkan beberapa diantaranya sudah memperoleh informasi tentang pangan dan keamanan pangan secara resmi dari SKPD terkait. Dalam penerapan proses produksi pangan keseharian sebagai produsen pangan/ pedagang pangan sudah mau dan mampu menerapkan informasi yang diperoleh, dengan tidak menggunakan BTP berbahaya yang merugikan kesehatan. Sebagian lagi ada kemauan tetapi belum ada kemampuan, hal ini dimungkinkan karena kurangnya pengetahuan produsen pangan/ pedagang pangan karena mereka tidak memproduksi sendiri pangan yang dijualnya/ membeli dari agen atau distributor pangan sehingga pangan yang dijualnya tidak diketahui mengandung BTP berbahaya atau tidak, dan kurangnya pengetahuan pedagang dalam mengenali pangan yang mengandung BTP berbahaya.

SIMPULAN dan SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa :

1). Teridentifikasi lebih lanjut bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013 tentang Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan berbahaya sudah diimplementasikan dengan baik, namun belum optimal dalam sosialisasi keamanan pangan, penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggar Perda dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain.

2). Teridentifikasi lebih lanjut bahwa pengetahuan dan sikap produsen dalam memproduksi pangan yang aman di Kota Pekalongan bahwa pengetahuan produsen pangan/ pedagang pangan sebagian sudah mengetahui tentang keamanan pangan. Sebagai produsen pangan/ pedagang pangan sudah mau dan mampu memproduksi pangan yang aman, yang dikuatkan dengan sudah ada izin produksi, tetapi sebagian lagi ada sudah ada kemauan tetapi belum ada kemampuan.

Berdasarkan penarikan kesimpulan yang ada, maka dapat disarankan sebagai berikut :

1). Pemerintah Kota Pekalongan, melalui Bappeda Kota Pekalongan dapat melakukan sosialisasi elaboratif tentang

keamanan pangan pada dinas terkait dan lintas sektor, yakni : Dinkes, Dinperpa, Dindakop dan UMKM, Diskominfo, Dindikpora, Depag, Satpo PP, Polres Pekalongan Kota dan lembaga masyarakat ataupun UMKM di masyarakat.

2). Materi yang dapat diberikan pada saat sosialisasi elaborasi keamanan pangan dapat berupa : (1). Peningkatan kapasitas petugas pelaksana pengawasan keamanan pangan dapat disampaikan kepada Dinkes, Dinperpa, Dindakop dan UMKM Kota Pekalongan; (2). Dampak bahaya pangan mengandung bahan tambahan pangan berbahaya dan sanksi hukum dapat disampaikan kepada Satpol PP dan Polres Pekalongan Kota; (3). Jenis-jenis bahan tambahan pangan berbahaya dan sanksi hukum pelanggaran perda dapat disampaikan kepada UMKM di Kota Pekalongan; dan (4). Ciri pangan mengandung bahan tambahan pangan berbahaya dan bahayanya bagi kesehatan dapat disampaikan kepada Diskominfo dan lembaga masyarakat yang ada di Kota Pekalongan.

3). Pemerintah Kota Pekalongan melalui Bappeda Kota Pekalongan, menjalin komunikasi efektif dengan Pemerintah Daerah lain di sekitar Kota Pekalongan untuk dapat melakukan pengawasan

keamanan pangan bersama terhadap pangan yang beredar di masyarakat.

4). Produsen pangan yang belum memiliki Izin SPPIRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Pangan) untuk segera mengurus perizinan tersebut.

5). Produsen pangan yang belum memperoleh informasi tentang keamanan pangan, dapat mengajukan permohonan sosialisasi atau peningkatan kapasitas pengetahuan tentang keamanan pangan pada dinas terkait.

TERIMA KASIH

Dengan ini disampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Slamet Budiyo, SKM, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan atas pemberian izin lokasi penelitian serta atas izin belajar yang diberikan.
2. Bapak Zainul Hakim, SH, M.Hum selaku Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, atas izin lokasi penelitian
3. Bapak Bambang Nurdianto, SH selaku Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Pekalongan atas izin lokasi penelitian

DAFTAR PUSTAKA

- Anggiarini, N.A.,L. Hanim, dan U. Ma'ruf. 2018. *Studi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Bahan Tambahan Pangan Pada Jajanan Anak Sekolah Menu rut Permenkes No. 033 Tahun 2012 di Kabupaten Jepara*. Semarang. Jurnal Hukum Khaira Ummah Volume 13 (1), Maret 2018 : 215 – 228. (online). Diunduh tanggal 26 September 2018. <http://jurnal.unissula.ac.id>
- Anggrahini, S. 2015. *Kemanan Pangan*. Jakarta. PT Kasinus
- Athaya, Z. R., E. Elmatris, dan H.Kadri. 2015. *Identifikasi Boraks pada Cincau Hitam yang Diproduksi Beberapa Produsen Cincau Hitam di Kota Padang*. Padang. Jurnal Kesehatan Andalas Volume 3 (1), Tahun 2015: 37-40 . Diunduh tanggal 10 Agustus 2020. <http://jurnal.fk.unand.ac.id>
- BPOM di Semarang. 2017. *Modul Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Penyuluh Keamanan Pangan Tahun 2017*. Semarang. BPSDM Prov Jateng.
- _____. 2019. *Laporan Tahunan BPOM di Semarang Tahun 2018*. Badan Pengamanan Obat dan Makanan Republik Indonesia. <https://pom.go.id>, diakses tanggal 02 Februari 2020.
- Chaudhur. 2015. *Food Safety: A Public Health Priority*. Indian Journal of Public Health, Volume 59, Issue 2, April-June, 2015. Diunduh tanggal 05 Februari 2020. <http://www.ijph.in>.
- Dinkes Kota Pekalongan. 2011. *Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2010*. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
- _____. 2012. *Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2011*. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
- _____. 2013. *Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan Tahun 2012*. Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
- Estiasih, T., W.D.R Putri, dan E.Widyastuti. 2015. *Komponen Minor dan Bahan Tambahan Pangan*. Jakarta. PT.Bumi Aksara
- Handayani, S, dan H. Hartono. 2016. *Hubungan Pengetahuan Gizi Pengelola Kantin Tentang Gizi BTP, Terhadap Penggunaan BTP Beresikopada Makanan Anak SD di Surakarta*. Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Volume 5 (2) Tahun 2016: 110-237. <http://jurnal.poltekkes-solo.ac.id>
- Istiqomah, S.,M.B Sudarwanto, dan E. Sudarnika⁽³⁾ et al. 2016. *Penambahan Bora alam Bakso dan Faktor Pong Penggunaannya Bagi Pedagang Bakso di Kota Bengkulu*. Jurnal Sain Veteriner, Volume 34 (1) Tahun 2016. Diunduh tanggal 10 Agustus 2020. <http://jurnal.ugm.ac.id>

- Kholid, A. 2012. *Promosi Kesehatan dengan Pendekatan Teori Perilaku, Media dan Aplikasinya*. Jakarta. Rajawali Pers
- Laksmi, A.S.W., N.P Widayanti, dan M.A.FRefi.2018.*Identifikasi Rhodamin B Dalam Saus Sambal yang Beredar Di Pasar Tradisional Dan Modern Kota Denpasar*.Jurnal Media Sains Volume 2 (1) Tahun 2018: 8-13.<http://jurnal.undhirabali.ac.id>
- Nuraini, S. 2016.*Analisis Kandungan Bahan Tambahan Dilarang Pada Pangan nJajanan Anak Sekolah (PJAS) di Sekolah Dasar Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung*. Jurnal Analis Kesehatan, Volume 5 (1) Tahun 2016: 490-493. <http://ejournal.poltekkes-tjk.ac.id>
- Nurdin, N, dan U. Budi. 2018. *Tinjauan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Pada Makanan Jajanan Anak Sekolah*. Jurnal Riset Kesehatan, Volume 7 (2) Tahun 2018: 85-90. Diunduh tanggal 31 Oktober 2019. <http://ejournal.poltekkes-smg.ac.id>
- Nurhamida, N. 2019. *Kandungan Bahan Kimia Berbahaya pada Bakso di Kota Bogor Tahun 2015-2017 (Studi Kasus)*. Skripsi. Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor (IPB). Bogor
- Paratmanitya, Y, dan V. Aprilia. 2016. *Kandungan bahan tambahan pangan berbahaya pada makanan jajanan anak sekolah dasar di Kabupaten Bantul*. Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia, Volume 4 (1) Tahun 2016: 49-55. Diunduh Tanggal 31 Oktober 2019. <http://ejournal.almaataa.ac.id>
- Peraturan Badan Pengamanan Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 *Bahan Tambahan Pangan*. 01 Juli 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 723. Jakarta
- Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 07 Tahun 2013 *Larangan Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Berbahaya*. 29 Juli 2013. Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 7. Kota Pekalongan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 *Bahan Tambahan Pangan*. 01 Maret 2012. Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 *Kemanan Pangan*. 26 Desember 2019. Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6442. Jakarta
- Radar Pekalongan. 2019. *Produksi Mie Basah Berformalin Diungkap*. Sabtu, 14 Desember 2019.

- Rahayu, P.W, dan I. Susalit. 2018. *Keamanan Pangan Kepedulian Kita Bersama*. Bogor. PT Penerbit IPB Perss.
- Rakes, S.P., R. Thiagesan, dan R. Ramachandran. 2017. *A Point Source Outbreak of Acute Gastroenteritis among School Students in Kerala, India*. Indian J Public Health 2017;61:302-4. Diunduh tanggal 05 Februari 2020. <http://www.ijph.in>.
- Rofieq, A., E.P. Dewangga, dan M.H Lubis. 2017. *Analisis Bahan Tambahan Pangan Berbahaya Dalam Jajanan Di Lingkungan Sekolah Menengah Atas Propinsi Jawa Timur Indonesia. Prosiding Seminar Nasional III Tahun 2017 Universitas Muhammadiyah Malang "Biologi, Pembelajaran, dan Lingkungan Hidup Perspektif Interdisipliner"*: 75-83. Malang, 29 April 2017. Diunduh tanggal 09 Oktober 2018. <http://research-report.umm.ac.id>
- Sahani .W, dan J. Yuni. 2017. *Kandungan Zat Pewarna Metanil Yellow pada Tepung Paniryang Dijual di Pasar Tradisional Kota Makassar*. Jurnal Sulolipu : Media Komunikasi Sivitas Akademik dan Masyarakat Volume 17 (1) Tahun 2017: 56-59. Diunduh tanggal 10 Agustus 2020. <http://journal.poltekkes-mks.ac.id>
- Sajiman, Nurhamidi, dan Mahpolah. 2015. *Kajian Bahan Berbahaya Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Methalyn Yellow pada Pangan Jajanan Anak Sekolah Di Banjarbaru*. Jurnal Skala Kesehatan Volume 6 (1) Tahun 2015. Diunduh tanggal 10 Agustus 2020. <https://ejournalskalakesehatan-poltekkesbjm.com>
- Sharma, B., dan K. Satinder. 2015. *Microbial Evaluation of Bottled Water Marketed in North India*. Indian J Public Health 2015;59:299-301. Diunduh tanggal 05 Februari 2020. <http://www.ijph.in>.
- Surati. 2015. *Bahaya Zat Aditif Rhodamin B pada Makanan*. Biologi SKL Volume 4 (1). Tahun 2015: 22-28. Diunduh tanggal 10 Agustus 2020. <http://Jurnal.iainambon.ac.id>
- Surono, I.S., A. Sudibyo, dan P. Waspododo. 2018. *Pengantar Keamanan Pangan untuk Industri*. Yogyakarta. Penerbit Deepublish
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 *Pangan*. 16 November 2012. Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Jakarta
- Wijaya, H., N. Mulyono, dan F.A. Afandi. 2018. *Bahan Tambahan Pangan Pengawet*. Bogor. PT Penerbit IPB Perss.
- Yulisa, N.Y., E. Asni, dan M. Azrin. 2014. *Uji Formalin pada Ikan Asin Guramidi Pasar Tradisional Pekanbaru*. Jom FK Volume 1 (2) Oktober 2014. Diunduh tanggal 10

Agustus 2020.
<https://media.neliti.com>

Zuraida, R., O. Saputra., Z. Sahli, dan A. Aprilia 2017. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Jajanan Anak Sekolah Dasar terhadap Penggunaan Pewarna Metanil Yellow di Kecamatan Sukarame Bandar Lampung Tahun 2015*. Jurnal Kesehatan dan Agromedicine Volume 4 (1). Tahun 2017.
<https://juke.kedokteran.unila.ac.id>